# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an, bersamaan dengan munculnya berbagai aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme (Hikmat 2004 dalam Suryono dan Trilaksono, 2007:24). Konsep pemberdayaan muncul karena dua premis mayor yakni kegagalan dan harapan (Friedman, 1992:31), sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas (Prijono dan Pranarka, 1996). Konsep pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Friedman, 1992:31). Pemberdayaan dilakukan pemerintah digolongkan Sumodiningrat (1999:134) ke dalam tiga kelompok. Pertama, kebijaksanaan secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. Kedua, kebijaksanaan secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dikaitkan dengan kemandirian, jaringan kerja, keadilan, dan partisipasi. Partisipasi menurut Prasojo (2004) dalam Suryono dan Trilaksono (2007:28) adalah komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Hal ini tidak jauh beda dari pendapat Gajanayake (1993:6) yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasi. Hal ini berimplikasi pada kegiatan memampukan masyarakat untuk memahami realitas pada lingkungannnya, menentukan refleksi pada faktor-faktor yang menentukan lingkungannya dan meletakkan langkah-langkah untuk merubah efek dengan merubah situasi. Lebih lanjut Gajanayake mengatakan bahwa "*empowerment helps people to liberate themselves from mental and physical dependence"* (yang paling penting dari pemberdayaan adalah upaya untuk membantu orang untuk membebaskan dirinya secara mental maupun fisik). Melalui hal tersebut Mardikanto dan Soebiato (2012:82) mengatakan bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, melainkan juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Berdasarkan hal di atas, Subejo dan Narimo mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Mardikanto dan Soebiato, 2012:31). Sejalan dengan hal tersebut,

Sumodiningrat dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2012:32) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan sebagainya agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.

**2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Narayan (2002:18), konsep pemberdayaan terdapat 4 (empat) prinsip yang harus dijadikan landasan dalam kegiatan pemberdayaan, adalah:

1) Akses pada informasi

   Dalam aspek ini menekankan pentingnya pola komunikasi dua arah, yaitu komunikasi antara pemerintah dengan warganya secara kritis, bertanggungjawab dan responsif. Adanya pola komunikasi dua arah maka dapat memberikan keuntungan baik terhadap pemerintah maupun warganegara.

2) Inklusi dan partisipasi

   Dalam pemberdayaan masyarakat, inklusi menghendaki pada pertanyaan siapa yang terlibat, sedangkan partisipatif merujuk pada bagaimana mereka dilibatkan dan bagaimana mereka memainkan peran, dalam hal ini partisipasi didasarkan pada pemberian otoritas kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan para pejabat publik atau stakeholder yang lain untuk mempertanggungjawabkan kebijakan maupun pengelolaan dana pemberdayaan kepada masyarakat.

4) Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan orang-orang untuk bekerjasama, mengorganisasi mereka sendiri, dan memobilisasi sumberdaya sebagai jalan keluar dari kepentingan bersama. Dalam hal ini kapasitas organisasi lokal merupakan kunci bagi efektifitas pembangunan.

Berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan sekurang-kurangnya meliputi akses pada informasi berkenaan dengan terwujudnya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga negara (masyarakat nelayan) secara kritis. Sedangkan Inklusi dan partisipasi berkenaan dengan siapa yang terlibat, bagaimana mereka dilibatkan dan memainkan peran. Selanjutnya akuntabilitas berkenaan dengan kebertanggungjawaban para pejabat publik atau stakeholder dalam kebijakan dan pengelolaan dana pemberdayaan, dan kapasitas organisasi lokal berkenaan dengan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama, mengorganisir, dan memobilisasi sumberdaya sebagai jalan keluar dari kepentingan bersama.

**3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam konteks pekerjaan sosial, Mardikanto dan Soebiato (2012:161) menguraikan bahwa pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, Mikro, Mezzo, dan Makro.

a) Pendekatan Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas.

b) Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan diberi ruang gerak yang sangat luas dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihapinya.

c) Pendekatan Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi

untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan pemberdayaan terdiri dari pendekatan Mikro, Mezzo, dan Makro yang dimaksudkan agar tercapai suatu kondisi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan.

**4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:65) menjelaskan bahwa sebagai sebuah proses, maka pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan.

1) Tahap penyadaran, dalam hal ini berkenaan dengan diberikan pemahaman mengenai hak untuk menjadi berada, bahwa pemberdayaan mengharuskan muncul dan berasal dari diri sendiri. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.
2) Tahap pengkapasitasan, dalam hal ini berkenaan dengan diberikannya pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis dengan tujuan untuk meningkatkan *life skill*. Sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan dalam mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.
3) Tahap pendayaan, dalam hal ini berkenaan dengan diberikannya peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,

diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Berdasarkan pembagian tahapan pemberdayaan di atas, sebagai sebuah proses pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan. Tahap penyadaran, tahapan ini masyarakat diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Tahap pengkapasitasan, diupayakan memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis. Tahap pendayaan, memberikan peluang kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan.

## B. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

### 1. Karakteristik Masyarakat Nelayan

#### a. Pengertian

Masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut berupa nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, *supplier* faktor sarana produksi perikanan. Nelayan merupakan kelompok yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya Nikijuluw (2001:14).

#### b. Karakteristik

Pembangunan masyarakat nelayan dan desa pantai tidak bisa lepas dari pembangunan masyarakat desa pada umumnya. Nelayan memiliki karateristik

yang berbeda dengan masyarakat sosial pada umumnya, berdasarkan karakteristik sosial masyarakat nelayan dibagi atas tiga sudut pandang, yaitu:

1) Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh.
2) Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usaha, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.
3) Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002:17)

Secara garis besar dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka masyarakat pesisir (nelayan) tidak lain adalah beraktifitas sebagai nelayan untuk mencari ikan di laut dengan menggunakan kapal/perahu, karenanya berdasarkan teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi, digolongkan oleh Satria (2002) dalam Mussawir (2009:30-31) ke dalam empat kelompok, yaitu:

1) Pertama, *peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya bersifat (subsisten), menggunakan alat tangkap yang masih tradisional seperti

dayung, sampan yang tidak bermotor dan hanya melibatkan anggota keluarganya sendiri sebagai tenaga kerja utama.

2) Kedua, *post-peason fisher* dengan berkembangnya motorisasi perikanan, nelayanpun berubah dari *peasant-fisher* menjadi *post-peasant fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju atau modern.
3) Ketiga, *commersial-fisher*, yakni nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan.
4) Keempat, *industrial fisher* yang memiliki ciri-ciri: 1) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agro industri di negara maju; 2) lebih padat modal; 3) memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana; dan 4) menghasilkan produk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Firth (1967) dalam (Suyanto, 2011) mengingatkan, bahwa masyarakat nelayan setidak-tidaknya memiliki lima karakteristik yang membedakan dengan masyarakat petani pada umumnya. Kelima karakteristik tersebut terutama karena:

1. Pendapatan nelayan biasanya bersifat harian *(daily increments)* dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri. Dengan pendapatannya yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan, dan sangat tergantung pada musim, maka mereka sangat kesulitan dalam merencanakan penggunaan pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk segera membelanjakan uangnya sesegera setelah

mendapatkan penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit untuk mengakumulasikan modal atau menabung. Pendapatan yang mereka peroleh pada musim penangkapan ikan habis digunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan tersebut;

2. Tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan pada umumnya rendah;
3. Nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk tersebut yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang;
4. Bidang perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya; dan
5. Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada mata pencaharian penangkapan ikan.

Berdasarkan uraian terkait karakteristik masyarakat nelayan di atas, dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat nelayan selain juga membedakan dengan petani pada umumnya, juga telah bersaing dalam kelompoknya.

**c. Hubungan Kerja**

Hubungan *patron-klien* sebenarnya banyak ditemukan di kehidupan petani proletar. *Patron-klien* melibatkan hubungan antara seorang individu dengan status sosial ekonomi lebih tinggi (*patron*) yang menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk menyediakan perlindungan dan keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (*klien*). Dalam hal ini terutama nelayan tradisional, Aldwin (2009) dalam Mussawir (2009:32) menjelaskan *patron* adalah toke ikan atau toke perahu yang lazim disebut dengan nelayan kaya. *Klien* adalah nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya kepada toke ikan atau toke-toke perahu terutama saat laut pasang, sehingga mereka tidak boleh melaut. Selama masa menganggur itulah toke ikan atau toke perahu tetap menjamin kehidupan sehari-hari para nelayan tradisional dan keluarganya. Pada aktivitas *patron-klien* tersebut seringkali terjadi sistem bagi hasil oleh nelayan buruh dan nelayan pemilik. Kenyataan menunjukkan, bahwa nelayan pemilik memperoleh bagian lebih besar dari pada nelayan buruh dalam sistem bagi hasil. Bagi hasil ini berlaku pada setiap tingkat skala usaha penangkapan, bahkan dalam unit penangkapan modern, tingkat kesenjangan perolehan pendapatan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh sangat besar.

Hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan suatu gambaran masyarakat nelayan di Indonesia, berbagai kecenderungan yang dikemukakan nampak bahwa aktifitas sosial ekonomi yang terakumulasi pada karakteristik dan hubungan kerja masyarakat nelayan telah menyebabkan masalah kemiskinan nelayan. Meskipun data kuantitatif yang terpercaya tidak mudah diperoleh, pengamatan visual atau

langsung ke kampung-kampung nelayan jauh lebih penting terutama dapat memberikan gambaran tentang kemiskinan nelayan di tengah-tengah kekayaan laut bahari yang sangat besar.

**2. Kemiskinan Masyarakat Nelayan**

Kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan masyarakat nelayan disebabkan oleh tiga hal, yaitu Kemiskinan struktural, Kemiskinan super-struktural, dan Kemiskinan kultural (Nikijuluw, 2001:15).

1. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan.
2. Kemiskinan Super-struktural adalah kemiskinan disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang

diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain *affirmative actions,* perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

3. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, *inheren,* dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (*patron*) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini.

Panayotou (1982) dalam Nikijuluw (2001:16) menjelaskan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani

kehidupan itu (*preference for a particular way of life).* Hal ini tidak jauh beda dari pendapat Subade dan Abdullah (1993) dalam Nikijuluw (2001:16) dengan ditekankan pada nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah, karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Sejalan dengan hal tersebut Kusnadi (2002:19) membagi persoalan nelayan lebih spesifik, bahwa pengalamannya selama ini telah menunjukkan tidak mudahnya mengatasi kemiskinan yang membelenggu nelayan di berbagai segi kehidupan. Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan disebabkan oleh sejumlah faktor kelemahan, diantaranya:

> ***Pertama***, sebab-sebab kemiskinan nelayan yang bersifat internal yang mencakup: 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; 3) hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh; 4) kesulitan melakukan diverifikasi usaha penangkapan; 5) ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melaut; dan 6) gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.
> ***Kedua***, sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal, mencakup: 1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; 2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; 3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pancemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; 4) penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah

lingkungan; 5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan; 6) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen; 7) terbatasnya peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa nelayan; 8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan 9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Melihat hal itu, Hadiwageno dan Pakpahan (1992) dalam Mussawir (2009:23) mempertegas bahwa kemiskinan masyarakat nelayan disebabkan oleh empat sebab utama, yaitu 1) sumber daya alam yang rendah, 2) teknologi dan unsur pendukung yang rendah, 3) sumber daya manusia yang rendah, dan 4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

### 3. Indikator Keberdayaan Masyarakat Nelayan

Kusnadi (2009:33) merumuskan, bahwa suatu masyarakat nelayan telah mencapai keberdayaan apabila telah tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi. Hal sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Indikator Keberdayaan Masyarakat Nelayan**

| No. | Kesejahteraan Sosial Ekonomi |
|---|---|
| 1 | Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat dan kepercayaan diri meningkat. |
| 2 | Nilai tabungan dan investasi bertambah. |
| 3 | Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan. |
| 4 | Kondisi kualitas SDM berkembang dengan baik. |
| 5 | Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil. |
| 6 | Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal. |
| 7 | Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. |

| | |
|---|---|
| **8** | Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, kapital, pasar, teknologi dan jaringan kemitraan. |
| **9** | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir. |
| **10** | Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi. |

*Sumber: Kusnadi (2009:33)*

Berdasarkan hal di atas, upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dilakukan agar mencapai keberhasilan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Dalam penelitian ini akan dibatasi dengan fokus terhadap hal-hal berikut, yaitu (1) kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat; (2) berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, pasar, teknologi dan jaringan kemitraan; (3) kondisi kualitas SDM berkembang dengan baik; dan (4) potensi sumberdaya lingkungan terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

**4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Dalam perkembangannya ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dapat digunakan dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan. Kelima pendekatan tersebut menurut Nikijuluw (2001:20), yaitu 1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, 2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*), 3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, 4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, dan 5) membangun

solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

1. Mengembangkan mata pencaharian alternatif

   Dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumberdaya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera. Pengembangan mata pencaharian alternatif ini diadakan untuk mengalihkan profesi nelayan ataupun menjadi tambahan pendapatan. Dengan kata lain, program diversifikasi pendapatan layak untuk dikembangkan, diarahkan bukan saja untuk nelayan tetapi juga untuk anggota keluarganya, terutama istri atau perempuan nelayan yang besar potensinya.

2. Akses terhadap modal

   Pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk

memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

3. Akses terhadap teknologi

   Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Berkaitan dengan teknologi yang digunakan, terdapat juga sifat masyarakat (nelayan) yang menentukan atau ditentukan oleh penggunaan teknologi tersebut. Untuk itu maka perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat dan karakteristik masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan.

4. Akses terhadap pasar

   Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah satu kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan pasar lokal hingga perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal

kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

5. Pengembangan aksi kolektif

   Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan suatu aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu (Nikijuluw, 2001:20-23).

Berdasarkan hal di atas, terdapat lima pendekatan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan diantaranya meliputi mengembangkan mata pencaharian alternatif, akses terhadap modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan pengembangan aksi kolektif.

## C. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

### 1. Peran Penting Kelembagaan Sosial Masyarakat

Kelembagaan dipandang sebagai variabel paling strategis di dalam pendekatan baru teori-teori pembangunan. Bahkan peran inovasi kelembagaan dinilai lebih penting semakin menempati posisi penting dibanding sekedar inovasi teknologi maupun inovasi sosial, sebab inovasi teknologi dan sosial hanya dapat diimplementasikan dengan baik jika cukup tersedia kelembagaan yang dapat berfungsi efektif (Mardikanto 2009 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:191). Sejalan dengan hal tersebut Ruttan dan Hayami (1984) mendefinisikan kelembagaan sebagai:

Aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

**2. Beroperasinya KIMBis Terdukung Pemberdayaan**

Selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) di Kabupaten Lamongan merupakan wujud kegiatan mencakup tujuan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat secara aktif, langsung, dan terkoordinasi dengan mengoptimalkan sumberdaya alam laut yang telah ada. Sasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah masyarakat (nelayan miskin) di desa pesisir, yang basis ekonomi desanya ditopang oleh kegiatan perikanan. Meskipun sasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah nelayan miskin, namun untuk meningkatkan kehidupannya maka pelaksanaan kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis juga mengikutsertakan masyarakat lain yang terkait dengan kehidupan masyarakat nelayan tersebut, dan atau program lain yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian nelayan miskin yang dimaksud tidak harus masyarakat yang kehidupannya tergantung penuh pada aktivitas perikanan, namun dapat juga buruh nelayan, pengolah hasil perikanan maupun pedagang pengumpul.

**a. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum pengentasan kemiskinan pada berbagai wilayah di Indonesia dan sekaligus sebagai landasan Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah:

a. Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, tanggal 25 Februari 2010;
b. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, tanggal 21 April 2010;
c. Hasil rapat kabinet pada 13 Februari 2011 tentang evaluasi kebijakan penurunan tingkat kemiskinan; dan
d. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro-rakyat.

Sedangkan, regulasi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah SK Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Nomor 12.1/BALITBANGKP/ RS.210/I/2012 tentang pembentukan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam mendukung Program Peningkatan Kehidupan Nelayan. Serta, pelaksanaan Klinik IPTEK Mina Bisnis di Kabupaten Lamongan mengacu dan berdasarkan naskah perjanjian kerjasama yaitu Naskah Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BALITBANG-KP) dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Lamongan Nomor 24.1/BBPSEKP/TU. 330/2012 tertanggal 24 Mei 2012, tentang Operasionalisasi Klinik IPTEK Mina Bisnis untuk Diseminasi dan Pengawalan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG-KP) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

**b. Definisi**

Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah wadah komunikasi, advokasi / pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholder terkait, melalui pendekatan *techno-preneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. Klinik IPTEK Mina Bisnis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi (Petunjuk teknis KIMBis, 2011).

**c. Tujuan Beroperasi**

Klinik IPTEK Mina Bisnis dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Mempercepat proses diseminasi, adopsi dan difusi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi.

Berdasarkan tujuan didirikannya Klinik IPTEK Mina Bisnis di atas, dimaksudkan bahwa pembentukan kelembagaan ini sebagai strategi dalam upaya

menumbuhkembangkan kewirausahaan pada setiap diri masyarakat nelayan, dengan demikian mampu secara mandiri memperbaiki kualitas kehidupannya dan meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan konteks potensi lokal. Selain itu juga dilakukan adopsi dalam mempercepat diseminasi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara tepat dengan menggunakan teknologi yang diintroduksi.

**d. Fungsi**

Pembentukan KIMBis di wilayah pesisir diperlukan karena:

1. Kebutuhan masyarakat nelayan semakin berkembang sementara kapasitas mereka untuk memanfaatkan potensi lingkungannya masih terbatas.
2. Kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat nelayan semakin rumit, padahal mereka belum mampu menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri.

Dengan demikian, Klinik IPTEK Mina Bisnis secara langsung berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat nelayan berbasis IPTEK melalui pendekatan *technopreneurship*. Secara tidak langsung Klinik ini berfungsi memfasilitasi kepentingan atau kebutuhan antara sumber teknologi dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Fungsi ekonomi Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah sebagai wadah untuk membina dan mendampingi pengembangan *entrepreneurship* masyarakat berdasarkan potensi sumberdaya pada lingkungannya, sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir. Untuk melaksanakan fungsinya, Klinik IPTEK Mina Bisnis merancang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

sehingga pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dapat dilakukan *oleh*, *dari*, dan *untuk* masyarakat nelayan setempat, namun untuk tahap awal kegiatan difasilitasi oleh pemerintah melalui pembinaan dan pendampingan pengurus.

## D. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

### 1. Pemahaman Komunikasi, Pendampingan, dan Konsultasi

#### a) Komunikasi

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua yang berhubungan sangat erat. Kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah "*as an integral part of development, and communication as a set of variables instrumental in bringing about development*" (Jayaweera dan Anumagama, 1987 dalam Sitompul, 2002:1). Komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi seluruh warga masyarakat (aparat pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, LSM, individu atau kelompok/organisasi sosial) untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan terencana demi tercapainya mutu hidup secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih (Mardikanto, 1987:20). Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 2002 dalam Mahmud, 2007:38).

Unsur komunikasi menurut Harold D. Lasswell, 1960 (Effendy, 2006) bahwa komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan "*who says what in which channel to whom with what effect* ?" (atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana). Melalui hal itu, maka diturunkan lima unsur komunikasi:

1) *Who* (siapa/ sumber)

   Sumber/ komunikator adalah pelaku utama/ pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.

2) *Says What* (pesan)

   Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal/ non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/ organisasi pesan.

3) *In Which Channel* (saluran/ media)

   Wahana/ alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (melalui media cetak/ elektronik dll).

4) *To Whom* (untuk siapa/ penerima)

Orang/kelompok/organisasi/ suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan (*destination*)/ pendengar (*listener*)/ khalayak (*audience*)/ komunikan/ penafsir/ penyandi balik (*decorder*).

5) *With What Effect* (dampak/ efek)

Dampak/ efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dll. Terdapat tiga pengaruh:

- Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu)
- Afektif (sikap seseorang terbentuk)
- Konatif (tingkah laku, hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).

**b) Advokasi/ pendampingan**

Kegiatan advokasi dilakukan dengan maksud agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara struktural, melembaga, dan berkelanjutan. Nusantara (2005) berpendapat, advokasi adalah tindakan atau protes untuk membela ataupun memberi dukungan. Memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat lemah, advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan (Pustaka-*community.org*, 2010).

Advokasi ditekankan pada pendampingan dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan

lainnya, membantu mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut. Advokasi yang dilakukan pekerja sosial seringkali sangat berkaitan dengan konsep manajemen sumber (DuBois dan Miley, 2005). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Strategi Advokasi/pendampingan**

| **Aspek** | ***Setting*** | | |
|---|---|---|---|
| | **Mikro** | **Mezzo** | **Makro** |
| Tipe | Kasus | Kelas | Kelas |
| Sasaran/klien | Individu dan keluarga | Kelompok formal dan organisasi | Masyarakat lokal dan nasional |
| Peran pekerja sosial | *Broker* (fasilitator) | Mediator | Aktivis dan analis kebijakan |
| Teknik utama | Manajemen kasus (*case management*) | Jejaring (*networking*) | Aksi sosial dan analisis kebijakan |

*Sumber: DuBois dan Miley, (2005:235-242) (Diolah penulis)*

**1) Aras Mikro**

Pada aras mikro, peran utama pekerja sosial adalah sebagai '*broker'* atau biasa disebut dengan fasilitator ataupun penghubung sosial, menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai fasilitator, teknik utama yang dilakukan pekerja sosial adalah manajemen kasus (*case management*) dengan mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

a) Melakukan dugaan terhadap situasi dan kebutuhan khusus klien

b) Memfasilitasi pilihan-pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif

c) Membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial

d) Menghimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial, parameter pelayanan, dan kriteria kelayakan

e) Mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat-syarat, prosedur-prosedur, dan proses-proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan

f) Menjalin relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci.

**2) Aras Mezzo**

Sebagai mediator, pekerja sosial mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi potensial, memobilisasi sumber, menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik yang dilakukan adalah dengan membangun jejaring (*networking*) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri serta tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama. Kegiatan yang dapat dilakukan pekerja sosial sebagai mediator diantaranya mencakup:

a) Menelisik pandangan dan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing pihak

b) Membantu pihak-pihak agar dapat bekerja sama

c) Mendefinisikan, mengkonfrontasikan, dan menangani berbagai hambatan komunikasi

d) Mengidentifikasi berbagai manfaat yang timbul dari adanya koalisi atau kerjasama

e) Memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka diantara berbagai pinak yang dilibatkan.

**3) Aras Makro**

Peran pekerja sosial pada tataran makro adalah rnenjadi aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan *lobby* dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*.

Fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Untuk menumbuhkan motivasi wirausaha diperlukan pendampingan, maka dilakukan proses *dialogical encounter* antara pendamping dengan masyarakat yang didampingi. Ini memerlukan *sense of trust* di antara keduanya. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelengaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun dinamisator (penggerak) (Vidhyandika dan Moeljarto, 1996:142). Dengan adanya pendamping ini, kelompok diharapkan tidak tergantung pada pihak luar namun berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan

yang berfungsi secara mandiri. Terlebih dari itu, Suharto (2006) merumuskan beberapa kegiatan dan proses advokasi/pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang berpusat pada empat bidang tugas/fungsi (4P), yaitu:

a) Pemungkinan atau Fasilitasi (*enabling*)

   Dalam hal ini berkenaan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

b) Penguatan (*empowering*)

   Dalam hal ini berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan masyarakat yang didampinginya.

c) Perlindungan (*protecting*)

   Dalam hal ini berkenaan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja (*networking*).

d) Pendukungan (*supporting*)

   Dalam hal ini berkenaan dengan kemampuan pendamping. Selain dituntut mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, juga

mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari ataupun mengatur sumber dana.

Dalam telaahnya terhadap strategi pemberdayaan, Suharto (1997) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2012:170) mengemukakan 5 (lima) aspek penting yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi, yaitu:

1. Motivasi

   Pemahaman nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan hak sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

   Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka.

3. Manajemen Diri

Setiap masyarakat-kelompok harus mampu mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu dalam mengembangkan sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4. Mobilisasi Sumberdaya

   Perlu adanya pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan cermat agar semua anggota memiliki kesempatan yang sama.

5. Pembangunan dan Pengembangan Jejaring

   Pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

**c) Konsultasi**

Dalam hal pemecahan masalah konsultasi tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, tidak lain adalah merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan. Konsultasi adalah proses menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik

untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. Suharto (2002) menjelaskan, bahwa konsultasi dilakukan sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan tenaga ahli dalam proses pemecahan masalah. Tenaga ahli membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau kemasyarakatan yang pernah dilakukan.

Hakekat program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya adalah menyiapkan masyarakat agar mereka berkeinginan dan mampu untuk memperbaiki mutu hidupnya (kesejahteraan), baik secara ekonomi, sosial, fisik, maupun mental melalui partisipasi secara aktif. Partisipasi konsultatif menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:89) meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
b. Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya
c. Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
d. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pendapat
e. Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

**2. Pemberdayaan Sebagai Penghubung Kegiatan Penelitian dan Penerapan Teknologi**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dipergunakan sebagai suatu proses alih teknologi atau perantara/penghubung antara kegiatan penelitian yang selalu berupaya menemukan dan mengembangkan teknologi dan penerapan

teknologi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengguna hasil-hasil penelitian. Hal sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

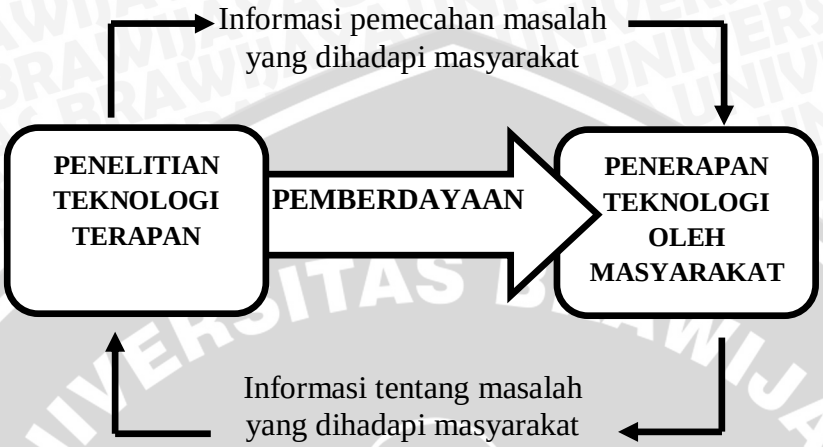


**Gambar 1. Pemberdayaan Sebagai Jembatan Penghubung antara Penelitian dan Penerapan Teknologi**
*Sumber: Mardikanto dan Soebiato (2012:178)*

Berdasarkan gambar di atas, dengan adanya keterkaitan (*linkage*) antara penelitian, pemberdayaan, dan penerapan teknologi, maka akan muncul pertimbangan dalam menentukan keberhasilan strategi teknologi inovasi yang diterapkan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

a) Kebijakan dan Tujuan Pembangunan

Perlu adanya ketegasan kebijakan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pembangunan, baik untuk tingkat nasional, regional, maupun di tingkat lokal. Harus diupayakan adanya komitmen penguasa terhadap pentingnya pembangunan masyarakat dalam arti luas, yang dinyatakan dalam bentuk kebijakan masyarakat untuk tercapainya tujuan pembangunan.

b) Alternatif Teknologi Masyarakat yang akan diterapkan

Pada dasarnya, teknologi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu teknologi hemat tenaga, teknologi hemat lahan, teknologi yang berskala netral, dan teknologi tepat guna. Masing-masing memiliki karateristik dan kondisi wilayah tertentu untuk dapat disalurkan dengan baik. Melihat hal itu, maka harus memperhatikan tipe-tipe teknologi yang ingin disuluhkan dan diterapkan, baik berkaitan dengan kesesuaian ataupun karateristik mayarakat yang dijadikan penerima manfaat.

c) Pengkajian Ulang Terhadap Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan dilaksanakan mengacu pada teori difusi, yakni menggunakan masyarakat lapisan atas sebagai penerima manfaat. Melalui proses difusi, diharapkan masyarakat perintis dijadikan panutan oleh masyarakat lainnya, dikarenakan proses adopsi inovasi akan relatif lebih cepat. Upaya ini ternyata sering dijumpai hambatan:

- Keengganan kelompok perintis untuk menyebarluaskan keberhasilannya kepada kelompok masyarakat lainnya
- Keengganan kelompok masyarakat yang lain untuk meniru keberhasilan masyarakat perintis.

d) Identifikasi Kategori Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan akan dihadapkan dengan penerima pemanfaat yang beragam, baik ragam kondisi wilayahnya, maupun keadaan sosial ekonominya. Oleh sebab itu, strategi pemberdayaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemetaan wilayah pemberdayaan, khususnya pemetaan wilayah berdasarkan keragaman keadaan ekologi masyarakat,
- Upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berkaitan dengan katagori masyarakat berdasarkan keinovatifannya, kemampuannya menyediakan sumberdaya, jenis kelamin, dan umurnya dalam kegiatan pemberdayaan, dan
- Pengembangan rekomendasi teknologi tepat guna.

e) Perumusan Strategi Pemberdayaan untuk Penerapan Teknologi

Pentingnya kegiatan pemberdayaan yang harus dilaksanakan pada tahapan-tahapan pembangunan masyarakat yang terdiri atas enam tahap, yaitu:

- Tahap pra-pembangunan
- Tahap eksperimental
- Tahap pengembangan komoditi
- Tahap pengembangan yang komperhensif
- Tahap diversifikasi usaha bernilai tinggi
- Tahap intensifikasi modal.

f) Pemilihan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (1995) menyatakan, bahwa meskipun strategi partisipatif dapat dinilai sebagai strategi terbaik, sesungguhnya tidak ada strategi pemberdayaan yang selalu efektif dan baik untuk semua penerima manfaat, karena pilihan strategi tergantung motivasi fasilitator dan perlu

memperhatikan kondisi kelompok penerima manfaat, yang dapat diuraikan ke dalam sebuah tabel kontinum di bawah ini:

**Tabel 5. Kontinum Strategi Pemberdayaan untuk Penghubung Penelitian dan Penerapan Teknologi**

| Karakteristik | TO DO FOR AGENT | TO DO TO PEOPLE | TO DO FOR PEOPLE | TO DO WITH PEOPLE | TO DO BY THE PEOPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Motivasi Fasilitator** | Bekerja untuk kepuasan fasilitator | Merekayasa masyarakat | Memasarkan inovasi kepada masyarakat | Bekerja bersama masyarakat | Dari, oleh, untuk masyarakat (partisipatif) |
| **Persyaratan dan Kondisi Masyarakat** | • Lebih mengutamakan pihak luar/fasilitator meskipun mengorbankan masyarakat | • Ada target yang harus segera dicapai<br>• Masyarakat dianggap bodoh<br>• Masyarakat sangat tergantung<br>• Tidak cukup tersedia alternatif<br>• Masyarakat paternalistik | • Cukup tersedia waktu untuk mencapai targetnya<br>• Masyarakat sudah mampu (berani) bersuara<br>• Cukup tersedia alternatif<br>• Cukup demokratis | • Masyarakat sudah mampu (ekonomis, intelektual, keterbukaan)<br>• Kepemimpinan demokratis tetapi masih memerlukan pendampingan | • Masyarakat sangat inovatif<br>• Swadaya masyarakat sangat tinggi<br>• Masyarakat sangat demokratis |

*Sumber: Mardikanto dan Soebiato (2012:184) (Diolah penulis)*

### 3. Jaringan Kerjasama (*Networking*)

Kompleksitas untuk mengelola kepentingan bersama muncul semakin menempati ke permukaan secara konsisten dan terlembaga sejalan dengan berkembangnya pendekatan *governance* (Pratikno, 2007). Semakin menguatnya praktek *democratic governance* di berbagai segi kehidupan, menuntut pembelajar ilmu administrasi publik dan implementor pembangunan untuk mendefinisikan kembali proses pembangunan bangsa. Realitas menunjukkan, proses pembangunan semakin mengarah kepada keterlibatan aktor-aktor di luar negara

(pemerintah). Dalam hal ini *governance* merujuk pada adanya *self-organizing* dan *interorganizational networks* dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Adanya interdependensi antar organisasi. Konsep *governance* lebih luas daripada *government* meliputi *non-state-actors*, sehingga dalam hal ini telah terjadi perubahan batasan antara sektor publik, privat, dan sukarelawan menjadi semakin tipis;
b) Adanya interaksi antar anggota *network* secara kontinyu sebagai akibat adanya kebutuhan untuk pertukaran sumberdaya dan tujuan bersama;
c) Adanya *game-like interactions* yang didasarkan pada kepercayaan dimana aturan mainnya merupakan kesepakatan diantara anggota *network* tersebut; dan
d) Tidak ada kekuasaan yang dominan, artinya *network* itu sendiri yang memiliki kewenangan dan tidak harus bertanggungjawab kepada kekuasaan negara (Kickert, dkk.,1999:27).

Melalui hal di atas, keterlibatan aktor di luar negara (publik, privat, dan sukarelawan) pada proses pembangunan dilakukan agar tercapai tujuan secara bersama dalam rangka pembangunan bangsa yang didasarkan atas partisipasi.

Dalam konteks *governance*, partisipasi hendak menempatkan masyarakat pada posisi yang sebenarnya. Pertama, masyarakat bukanlah sebagai hamba (*client*) melainkan sebagai warga (*citizen)*. Warga dan kewargaan merupakan bangun politik, yang menggambarkan sifat hubungan yang dimiliki individu dengan institusi negara dan masyarakat sipil. Kedua, masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai teman sejajar (*partner*) pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. Keempat, warga bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan. Warga diharapkan terlibat dalam urusan publik dan memberikan kontribusi terhadap isu-isu dalam arena publik (Raco dan Imrie, 2000).

Istilah *stakeholders* menurut Brown et al (2001) adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. *Stakeholders* adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu. Melalui definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* adalah para pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian ataupun perhatian. Misalnya terkait isu perikanan dan kelautan, maka aktor sebagai para pihak yang terkait dengan isu perikanan dan kelautan, seperti nelayan, pelaku usaha, pengolah hasil tangkap, investor, HNSI (himpunan nelayan seluruh Indonesia), RN (rukun nelayan), LSM (lembaga swadaya masyarakat) sumber daya laut, pedagang, tengkulak, pembudidaya, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan.

Penanggulangan kemiskinan dan industrialisasi perikanan dengan membentuk wadah kelembagaan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai salah satu *implementing agency* program peningkatan kehidupan nelayan di berbagai wilayah Indonesia, merupakan inisiasi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP), adalah satu diantara berbagai isu penting yang akan lebih baik terdapat pola kerjasama oleh berbagai aktor, akibat selama ini dipandang penyelesaian kemiskinan dan keterberdayaan masyarakat nelayan tidaklah mudah penyelesaiannya.

Melalui hal tersebut, perlu diperhatikan batasan bahwa inti dari kerjasama adalah adanya upaya pencapaian tujuan atau kepentingan dari berbagai pihak (aktor) secara bersama-sama dengan saling melakukan pertukaran sumber daya (*resources exchange*). Salah satu syarat keberhasilan sebuah *network* adalah

adanya realisasi tindakan kolektif (*collective actions*) untuk memunculkan tujuan bersama (*common purposes*) dan untuk mengatasi ancaman bersama (*common threats*). Namun upaya untuk itu tidaklah mudah. Pada umumnya sering terjadi kegagalan dalam sebuah *network* yang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kurang intensifnya hubungan dan adanya hambatan dalam melakukan tindakan kolektif,
2. Kurang jelasnya tujuan atau tujuan kurang menarik bagi semua pihak,
3. Tidak adanya aktor kunci,
4. Kurang tersedianya informasi penting mengenai tujuan, cara dan aktor-aktor yang perlu terlibat, dan
5. Kurang adanya komitmen antar aktor untuk mencapai tujuan bersama (Endarti, 2004:4).

Berdasarkan uraian di atas, ketergantungan antar aktor-aktor dalam kegiatan kerjasama dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya (Kickert dkk., 1999). Selain terjadi pertukaran sumber daya dan informasi, dalam interaksi juga didorong adanya pertukaran tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga eksternalitas ekonomi juga mampu dirasakan seluruh masyarakat di wilayah pesisir. Melalui hal itu, *stakeholders*/ aktor dalam kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan diantaranya, meliputi 1) Pemerintah Daerah: Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan peran pendukung kegiatan; 2) Pemerintah Pusat adalah BBPSEKP selaku inisiator sekaligus penanggungjawab kegiatan; 3) Tokoh masyarakat; dan 4)

Kelompok-kelompok masyarakat nelayan (pelaku usaha, pengolah, pedagang, pembudidaya, dan kelompok garam) sebagai subjek dan objek yang diberdayakan.

**4. Adopsi dan Difusi Inovasi dalam Pembangunan**

Pembangunan berbasis pedesaan merupakan alternatif untuk mengurangi dampak dari pembangunan yang cenderung bias urban. Oleh karenanya, paradigma terhadap pembangunan nasional juga harus diikuti dengan perubahan orientasi terhadap pembangunan ekonomi dan wilayah pedesaan yang tidak dapat lepas dari kebutuhan teknologi. Teknologi yang dimaksud lebih bersifat teknologi tepat guna (*appropriate technology*) yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya melalui pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimalis dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan.

Teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah (*value added*) tersebut harus diciptakan dan segera dimasyarakatkan agar bisa segera digunakan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan proses difusi penerapan teknologi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1983, melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Inovations*. Rogers (1983) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi

dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Ketika sebuah inovasi banyak diadopsi oleh sejumlah orang, hal itu dikatakan *exploded* atau meledak.

Menurut Havelock, 1973 (Sitompul, 2002:5) inovasi adalah segala perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya. Inovasi pembangunan yang perlu di sebarkan terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu Inovasi Rekayasa Teknologi, dan Inovasi Rekayasa Sosial. Inovasi rekayasa teknologi menyangkut berbagai piranti keras yang mendukung pelaksanaan fisik inovasi yang bersangkutan, dan inovasi rekayasa sosial mengacu pada rekayasa kelembagaan, pemikiran ideologis, dan nilai-nilai pendukung kualitas pembangunan manusia (Hubies, *et al*, 1995).

Penyebaran dan intervensi teknologi bertujuan untuk meningkatkan produksi terutama pendapatan masyarakat sasaran. Karakteristik teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hendaknya memiliki ciri-ciri:

a) Dapat meningkatkan produktivitas secara nyata, bukan merupakan komponen-komponen teknologi tetapi merupakan kesatuan utuh, sesuai dengan biofisik, sosial ekonomi, dan budaya,
b) Disesuaikan dengan kemampuan pengguna, dan

c) Adanya kelembagaan penunjang yang bertanggung jawab dalam pengadaan input, pemasaran, permodalan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung (Erlina dkk, 2010).

Ciri-ciri suatu inovasi menurut Rogers dalam (Khairinnisa, 2010):

a) Keuntungan relatif, berkenaan dengan sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status sosial (gengsi), kesenangan, dan kepuasan,

b) Kompatibel (*compatibility*), berkenaan dengan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi,

c) Kompleksitas (*complexity*), berkenaan dengan tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sebaliknya jika sukar dimengerti dan sukar digunakan maka lambat proses penyebarannya,

d) Triabilitas (*triability*), berkenaan dengan bisa dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Misalnya penyebarlusan bibit unggul akan mudah diterima masyarakat jika masyarakat mencoba dulu dan dapat melihat hasilnya,

e) Dapat diamati (*observability*), berkenaan dengan mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima masyarakat. Misalnya penyebarluasan penggunaan bibit unggul, karena masyarakat dapat dengan mudah melihat hasil dari menggunakan bibit tersebut, maka mudah untuk memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan.

Melalui hal di atas, maka muncul tahapan dalam adopsi teknologi menurut Rogers (Khairinnisa, 2010):

1) Tahap pengetahuan, dalam tahap ini seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat,
2) Tahap persuasi, dalam tahap ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang akan didapat jika megadopsi inovasi tersebut secara personal. Berdasarkan evaluasi dan diskusi dengan orang lain, ia mulai cenderung untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut,
3) Tahap pengambilan keputusan, dalam tahap ini seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Namun bukan berarti setelah melakukan pengambilan keputusan ini lantas menutup kemungkinan terdapat perubahan dalam pengadopsian,

4) Tahap implementasi, dalam tahap ini seseorang mulai menggunakan inovasi sambil mempelajari lebih jauh tentang inovasi tersebut,
5) Tahap konfirmasi, dalam tahap ini setelah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Apakah inovasi tersebut diadopsi ataupun tidak, seseorang akan mengevaluasi akibat keputusan yang mereka buat. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi.

Rogers dan Schoemaker, 1977 (Khairinnisa, 2010), mengelompokkan masyarakat berdasarkan penerimaan terhadap inovasi yaitu:

1) Inovator, dalam hal ini adalah kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. Biasanya orang-orang ini adalah mereka yang memiliki gaya hidup dinamis perkotaan dan banyak teman ataupun relasi,
2) Pengguna awal, kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Kategori adopter ini menghasilkan lebih banyak opini dibanding kategori lainnya, serta selalu mencari informasi tentang inovasi. Sehingga mereka disegani karena kesuksesan dan keinginan untuk mencoba inovasi baru,
3) Mayoritas awal, pada kategori ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Sebaliknya, mereka akan dengan berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi inovasi. Orang-orang seperti ini menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi, atau

menunjukkan kepada seluruh komunitas bahwa sebuah inovasi layak digunakan atau cukup bermanfaat,

4) Mayoritas akhir, kelompok ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang, tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka. Dalam kasus lain, kepentingan ekonomi mendorong mereka mengadopsi inovasi,
5) *Laggards*, kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Meraka bersifat lebih tradisional, dan segan untuk mencoba hal baru. Kelompok ini biasanya lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama. Adapun sekelompok *laggard* mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang justru sudah jauh mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang justru sudah jauh mengadopsi inovasi lainnya, dan mengangap mereka ketinggalan zaman.

Rogers dan Sverring, 1969 dalam (Shobaruddin, 1997:26) menunjukkan, bahwa saluran-saluran media dapat dimanfaatkan dan dipadukan dengan komunikasi interpersonal menggunakan *forum media*, kelompok-kelompok diskusi yang dipimpin agen perubahan, dan diajak berpartisipasi oleh individu sasaran. Keuntungan memadukan instrumen-instrumen komunikasi untuk perubahan sangat jelas, selain memperluas jangkauan agen perubahan yang memungkinkan mencapai kelompok-kelompok individu sasaran, juga memungkinkan agen menyampaikan pesan dan memastikan pengguna yang tadinya tidak mau menerima pengaruh dari agen. Ini juga memberikan

keuntungan kepada pengguna, pesan yang dibawa dapat diperiksa kembali dan dievaluasi dengan budaya kelompok sasaran.

Sejalan dengan hal di atas, dikuatkan oleh Hanafi 1987 dalam (Sitompul, 2002) yang mengatakan bahwa saluran interpersonal masih memegang peranan penting dibanding dengan media massa, terlebih di negara-negara yang belum maju di mana kurang tersedianya media massa yang dapat menjangkau khalayak terutama warga pedesaan, tingginya tingkat buta huruf dan tidak sesuainya pesan-pesan yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi saluran interpersonal dimanfaatkan apabila mengharapkan efek perubahan tingkah laku (*behaviour change)* dari komunikan.